

**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH
JALAN TOL PADANG-PEKANBARU TRASE PADANG-SICINCIN
DIKABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan



MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG-PEKANBARU TRASE PADANG SICINCIN DIKABUPATEN PADANG PARIAMAN

(Hafiz Ridho Feli, 2120123007, Fakultas Hukum Unand, 2021, 120 Halaman)

ABSTRAK Sebagai perwujudan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Negara diberikan kuasa untuk menjalankan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan terhadap bumi, air dan kekayaan alam Indonesia dengan tetap memperhatikan kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut salah satu contohnya adalah pembangunan jalan tol. Agar tetap memperhatikan kemanfaatan bagi pemilik tanah, maka pemerintah memiliki solusi dengan melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan peraturan dasar yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Masalah yang timbul kemudian dari pengadaan tanah yaitu lambannya proses pembebasan lahan disebabkan masyarakat tidak mau memberikan tanahnya akibat ganti rugi yang diberikan pemerintah dinilai sangat kecil. Permasalahan yang menjadi objek penelitian diantaranya : 1) Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru Trase Padang Sicincin Kabupaten Padang Pariaman? 2) Bagaimana pelaksanaan musyawarah dalam penyelesaian sengketa ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru trase Padang Sicincin Kabupaten Padang Pariaman? 3) Bagaimana Peran Notaris dalam ganti kerugian Pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru trase Padang Sicincin Kabupaten Padang Pariaman? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sumber data yang digunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, bahwa dalam hal penentuan ganti kerugian yang dinilai terlalu kecil pemerintah tetap melaksanakan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tersebut dengan menggunakan metode Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan (Konsinyasi) agar pembangunan bisa tetap dilaksanakan. Pelaksanaan musyawarah yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dan masyarakat Nagari Kasang, tidak adanya penyampaian hasil ganti kerugian yang jelas dan memiliki kepastian hukum, dengan demikian hal tersebut mengakibatkan sengketa dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru Trase Padang Sicincin. Penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru Trase Padang Sicincin tidak menemui kesepakatan, maka dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman,

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Jalan Tol dan Ganti Rugi

**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH
JALAN TOL PADANG-PEKANBARU TRASE PADANG SICINCIN
DIKABUPATEN PADANG PARIAMAN**

(Hafiz Ridho Feli, 2120123007, Fakultas Hukum Unand, 2021, 120 Halaman)

Abstract: *As an implementation of Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution, the state is empowered to manage the government, including the land, water, and natural resources of Indonesia, while still prioritizing the welfare of the people. One example of this is the construction of toll roads. To ensure the interests of landowners are considered, the government has established land acquisition policies for public purposes under Law Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Public Development. However, problems often arise in the land acquisition process, such as delays in land release, as the community perceives the compensation offered by the government as insufficient. This research focuses on three main issues: 1) What is the land acquisition process for the Padang-Pekanbaru toll road construction, Padang Sicincin Trase, Padang Pariaman Regency? 2) How is the deliberation process implemented to resolve compensation disputes in the land acquisition for the Padang-Pekanbaru toll road, Padang Sicincin Trase? 3) What role do Notaries play in the compensation process for the land acquisition for the Padang-Pekanbaru toll road, Padang Sicincin Trase? The research uses an empirical legal approach with a descriptive method. The data includes both primary and secondary sources, collected through field research and library studies. Data were gathered through interviews and document reviews, and then analyzed qualitatively. The study concludes that, despite compensation being considered too low by landowners, the government continued the construction of the Padang-Pekanbaru toll road using the Compensation Deposit method (Consignment) in court, allowing the project to proceed. The deliberation process between the land acquisition committee and the Kasang Nagari community did not result in a clear agreement, leading to a dispute. The compensation dispute was taken to the Pariaman Class IB District Court, where the compensation funds were deposited for further resolution.*

Keywords: Land Acquisition, Toll Roads and Compensation